

Judul : Jika PKS Menang di Kasasi: Fahri Siap Lepas Kursi Pimpinan DPR
Tanggal : Rabu, 31 Januari 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jika PKS Menang Di Kasasi

Fahri Siap Lepas Kursi Pimpinan DPR

PERSELISIHAN antara Fahri Hamzah dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nampaknya akan terus memanjang sampai ada putusan final dari Mahkamah Agung (MA). Namun, Fahri siap melepas jabatan pimpinan DPR, asalkan Presiden PKS Sohibul Iman menang di tingkat kasasi.

“Saya enggak akan ngotot-ngotot lah soal jabatan,” ujar Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Kata Fahri, jabatan hanyalah amanah dan bersifat sementara, sehingga tidak akan kekal. Untuk itu, siapapun yang nantinya menang di tingkat kasasi harus legowo dan menerima. “Siapa tahu PKS menang di kasasi kan. Kalau PKS menang di kasasi lain ceritanya kan. Sabar lah,” katanya.

Sebagai warga negara yang patuh dengan hukum, politisi dari NTB ini akan menerima dan menghormati putusan yang berlaku. Sikap legowo, lanjut Fahri, juga harus ditunjukkan elite PKS jika nantinya kalah di pengadilan.

“PKS juga harus belajar bagaimana menghormati keputu-

san hukum lah. Nanti saya juga akan menghormati keputusan hukum,” kata Fahri.

Konflik antara Fahri Hamzah dengan elite PKS bermula ketika Presiden PKS Sohibul Iman memecat Fahri sebagai kader PKS dan mengganti posisi wakil ketua DPR.

Merasa tidak mempunyai kesalahan, Fahri melawan keputusan partainya. Perlawanan dimulai ketika mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di PN Jakarta Selatan, Fahri dengan berbagai dalil dan fakta persidangan berhasil memenangkan gugatan petinggingnya seperti Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Tidak puas dengan keputusan PN Jakarta Selatan, PKS kemudian mengajukan banding. Namun, upaya PKS memecat Fahri tak terwujud. Fahri kembali menang dalam gugatan dan pemecatannya dari keanggotaan partai adalah tak sah.

Kini, konflik antara kader dengan partai sudah sampai ke tingkat kasasi dan masih menunggu keputusan hakim Mahkamah Agung. ■ REN